



MEN-SUPPORT KINERJA BUMDES KAYUAMBON, KABUPATEN BANDUNG BARAT

Soffan Marsus^{1*}, Alma Ariz Naini²

¹⁾ Akuntansi, Politeknik Keuangan
Negara STAN

²⁾ Akuntansi, Politeknik Keuangan
Negara STAN

Email : soffanm@pknstan.ac.id

Abstraksi

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah saat ini menerapkan strategi kewirausahaan desa dengan memberi kewenangan kepada desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi ini sejalan dengan kecenderungan global dalam pemerintahan yang dikenal sebagai *New Public Management* (NPM). Sebagai bagian dari kegiatan mahasiswa berupa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), penulis melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus *action research* untuk membantu menata usahakan persediaan pada BUMDes Desa *Mart* Desa Kayuambon, Kabupaten Bandung. Meskipun telah dilakukan pembelian aplikasi, penataan persediaan akseptasi teknologi dalam bentuk penggunaan aplikasi tersebut masih terkendala. Kendalanya adalah sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BUMDes Desa *Mart* masih memiliki berbagai keterbatasan seperti kompetensi serta pengalaman sumber daya manusia. Oleh karena itu, bantuan pemerintah berupa pelatihan atau program pengabdian masyarakat dari kampus, diharapkan dapat membantu BUMDes dapat mengejar ketertinggalan dari perusahaan pesaing.

Kata kunci: Akseptasi Teknologi, Aplikasi Persediaan, UMKM

Abstract

To improve the welfare of village communities, as the implementation of the Village Law No. 6 of 2014, the government is currently implementing a strategy of village entrepreneurship by giving the village authority to form a Village-Owned Enterprise (BUMDes). This strategy is in line with the global trend in governance known as the *New Public Management* (NPM). As part of the student work lecture (KKM), the writer conducts community service and action research to help administer the inventory at BUMDes Desa *Mart* Desa Kayuambon, Kabupaten Bandung. Although they have purchased an application to manage inventory, it turns out that technological acceptance in the use of the application is still hampered. Because, as a small and medium enterprise (SME), BUMDes Desa *Mart* still has various limitations such as lack of competence and experiences of human resources. Assistance from government in form of training or from university in form of community service programs, at least can help BUMDes immediately catch up with competing companies.

Keywords: Technology Acceptance, Inventory Application, Small and Medium Enterprise

© 2020 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

PENDAHULUAN

Waktu berjalan, hari berganti, pemerintahan suatu negara terus berubah. Di negara kita, Presiden telah berganti tujuh kali dari mulai Presiden Soekarno sampai dengan saat ini Presiden Joko Widodo. Strategi perubahan negara agar semakin sejahtera juga terus berubah dan berkembang. Pelaksanaan pembangunan pedesaan oleh pemerintah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, saat ini menerapkan strategi mewirauasakan desa dengan memberi kewenangan untuk membentuk lembaga

bisnis yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi ini sejalan dengan kecenderungan dalam pemerintahan pada tingkat global yang dikenal sebagai *New Public Management* (NPM). Salah satu buku berpengaruh terkait tren NPM ini adalah karya David Osborne dan Ted Gaebler yaitu *Reinventing Government* (Osborne dan Gaebler, 1992).

Maraknya implementasi pendirian BUMDes membawa kita pada kesimpulan bahwa pada dekade kedua abad 20 ini, ide mewirauasakan birokrasi di Indonesia telah masuk sampai ke pelosok-pelosok desa dan menjadi salah satu kebijakan yang

ditempuh pemerintah saat ini. BUMDes adalah hasil metamorfosis dari Koperasi Unit Desa (KUD) di masa Orde Baru yang dianggap telah gagal (Adhari dan Iskandar, 2017). Perbedaannya, kurang lebih hanya pada bentuk usahanya yang mana BUMDes menganut bentuk perusahaan semacam Perseroan Terbatas, KUD menganut bentuk koperasi, yang lebih khas Indonesia. Saat ini BUMDes disambut cukup baik oleh pemerintah dan warga desa dengan didirikannya cukup banyak BUMDes yang menjalankan bisnis BUMDes. Namun tentu saja di lapangan beberapa masalah masih dihadapi BUMDes.

Penulis bersama dengan mahasiswa tim Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) PKN STAN, berupaya menggali permasalahan tersebut. Penulis kedua *paper* ini adalah mahasiswa yang bertindak selaku ketua kelompok KKM ini. Sementara mahasiswa lainnya sebagai anggota ada sebanyak 5 orang semuanya mahasiswa semester IV dari beberapa Program Studi pada PKN STAN, yaitu Diesa Nuraini, Galih Fauzan, Gilang Rizki Ramadhan, Muhammad Irfan dan Verren Eka Hartono. Adapun lokasi penelaahan dilakukan di lokasi yang sama dengan kelompok mahasiswa yang melakukan KKM, yaitu di Desa Kayuambon, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan KKM dan penulisan *paper* ini adalah untuk memotret proses pengelolaan, lingkup bisnis, dan permasalahan pada BUMDes Kayuambon terutama unit usaha Desa *Mart*. Dalam memotret permasalahan yang dilakukan dengan model *action research* juga akan diupayakan untuk bisa memberikan solusi sehingga permasalahan dapat teratasi atau berkurang intensitasnya.

Pada pelaksanaan survei pendahuluan KKM, Desa Kayuambon merekomendasikan kelompok KKM untuk memilih objek BUMDes karena pada saat itu BUMDes sedang melakukan perbaikan dalam hal administrasi dan manajemen unit usahanya, khususnya unit usaha Desa *Mart* yang masih melakukan pencatatan transaksi secara manual walaupun BUMDes Kayuambon telah melakukan pembelian aplikasi yang bernama IPOS untuk membantu menata usahakan persediaannya.

Pelaksanaan KKM tanggal 22 Juli 2019 s.d 26 Juli 2019 telah berjalan dengan baik, dengan jenis-jenis kegiatan meliputi pengenalan kondisi Desa Kayuambon, pendalaman profil BUMDes Kayuambon, dan *sharing knowledge* terkait akuntansi BUMDes, Perpajakan BUMDes, serta manajemen BUMDes. Fokus pelaksanaan kegiatan KKM ini adalah pada unit usaha Desa *Mart* dan Unit Usaha Surabi Kayuambon.

TINJAUAN PUSTAKA

A. BUMDes sebagai UMKM

BUMDes, khususnya pada masa awal pendiriannya, termasuk dalam *small and medium Enterprise* (SME) atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),

yang perkembangannya membutuhkan dukung pemerintah. Usaha Kecil menurut UU No. 20 Tahun 2008 memiliki pengertian sebagai entitas yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Terkait SME ini, Sylvanus dkk. (2017) dalam penelitiannya yang berupaya membantu perusahaan bisnis skala kecil dan menengah Nigeria untuk bertahan di masa-masa sulit, mengungkapkan keberhasilan SME tersebut untuk tumbuh dengan mantap dan menjadi cukup kuat dapat berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan di Nigeria. Mengambil pelajaran dari hasil kajian tersebut, pemerintah dan akademisi dalam wilayah kampus perlu secara khusus mendukung BUMDes, salah satunya dengan memberikan pelatihan atau dengan melaksanakan program pengabdian masyarakat seperti yang kami lakukan ini.

B. Akseptansi Teknologi

Salah satu permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa *Mart* di Desa Kayuambon, Kabupaten Bandung, adalah belum adanya staf yang ditugaskan secara *full dedicated* serta staf yang ada, dari sisi kompetensi belum memiliki kompetensi khusus untuk menangani pencatatan persediaan barang dagangan yang menjadi bisnis BUMDes. Untuk mengelola toko retail dengan cukup banyak barang dagangan, saat ini mutlak diperlukan adanya bantuan suatu aplikasi pengelola pencatatan keluar masuk persediaan. Penanggung jawab BUMDes Desa *Mart*, sebenarnya telah berinisiatif untuk membeli aplikasi IPOS sebagai salah satu aplikasi cukup populer untuk keperluan tersebut. Namun pembelian aplikasi tidak disertai dengan pemberian pelatihan yang memadai kepada pegawai yang menangani, sehingga sampai beberapa lama aplikasi dibeli, belum dimanfaatkan secara baik.

Terkait permasalahan ini, *literatur* sistem informasi membahas banyak model untuk tujuan penelaahan akseptansi dan minat penggunaan aktual satu produk IT dari pengguna akhir (*end-user*). Salah satu model tersebut, dikenal sebagai *Technological Acceptance Model* (TAM), menjelaskan hubungan kausal antara keyakinan/*beliefs* dengan minat penggunaan riil. Keyakinan dimaksud dielaborasi ke dalam dua variabel yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* atas penggunaan suatu produk IT. Model tersebut diajukan pertama kali oleh Davis (1989) dan Davis dkk. (1989). Model TAM memiliki dua versi, yaitu pra-implementasi dan post-implementasi.

Model TAM kemudian berkembang, dan salah satunya dinamakan *The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), yang diajukan Venkatesh dkk. (2003). Venkatesh dkk. (2003) menyatakan UTAUT mengintegrasikan

berbagai model akseptansi IT. Model UTAUT mengajukan dua konstruk tambahan yang memiliki pengaruh langsung terhadap minat penggunaan, yaitu *Social Influence* (SI) dan *Facilitating Condition* (FC). Model ini juga mengajukan empat variabel pemoderasi yang meliputi jenis kelamin, usia, pengalaman, dan kesukarelaan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan KKM ini sekaligus menjadi pelaksanaan penelitian dengan model *action research*. Menurut Ferrance (2000) *action research* adalah:

... a reflective process that allows for inquiry and discussion as components of the "research." Often, action research is a collaborative activity among colleagues searching for solutions to everyday, real problems experienced in schools, or looking for ways to improve instruction and increase student achievement. Rather than dealing with the theoretical, action research allows practitioners to address those concerns that are closest to them, ones over which they can exhibit some influence and make change.

Dengan demikian *action research* ini selaras dengan nama kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, yaitu Kuliah Kerja Mahasiswa. Mahasiswa melaksanakan pembelajaran berdasarkan permasalahan yang nyata dialami oleh masyarakat dan berupaya memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dalam *action research* ini, teori tidak menjadi titik tekan penelitian, namun hanya menjadi latar belakang. Demikian pula halnya dengan teori-teori yang berkaitan, seperti model TAM serta model bisnis UKM, hanya menjadi dasar penambah wawasan dalam pembahasan, tidak menjadi dasar untuk elaborasi penelitian.

PEMBAHASAN

Desa Kayuambon adalah sebuah Desa yang terletak di kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Desa Kayuambon terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 146.1/SK.177-PEMDES/1983 perihal Pemekaran Desa Cibogo (Desa Induk) ke Desa Kayuambon, dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 10/PM.022.1/SK-PEMDES/PJ/1983 perihal Pemekaran Desa Cibogo (Desa Induk) menjadi dua yaitu Desa Cibogo dan Desa Kayuambon. Pendapatan desa terdiri dari tiga sumber yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pendapatan asli desa didapatkan dengan sumbangan dari masyarakat maupun dengan pembentukan badan usaha oleh perangkat desa dengan kesepakatan melalui musyawarah desa. Oleh karena itu desa

Kayuambon memiliki BUMDes yang resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan dua landasan operasional yaitu:

1. Peraturan Desa Kayuambon nomor 01 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Desa nomor 06 tahun 2010 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
2. Surat Keputusan Kepala Desa Kayuambon nomor 147.2/SK-005-ek/2018 tahun 2018 tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) periode 2018-2023.

BUMDes Kayuambon ini terletak dalam satu wilayah Kantor Desa Kayuambon yang beralamat di Jalan Maribaya Nomor 94, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dengan unit usaha yang sudah didirikan sampai dengan saat ini, yang meliputi:

1. Unit Usaha Desa *Mart* Kayuambon didirikan pada tanggal 25 Desember 2018 dan di resmikan tanggal 25 Januari 2019
2. Unit Usaha Pendistribusian Beras BPNT
3. Unit Pengolahan Pembakaran Sampah
4. Unit Usaha Surabi Kayuambon
5. Unit Jasa Loker Pembayaran

Berikut ini diuraikan fokus masalah, gambaran, serta langkah solusi yang telah ditempuh dalam membantu memecahkan permasalahan pada BUMDes Kayuambon.

1. Fokus Masalah: Akuntansi BUMDes, Transisi antara pencatatan manual dengan aplikasi di BUMDes Kayuambon terutama unit usaha Desa *Mart* dan Surabi Kayuambon.

Gambaran: Pada saat pelaksanaan KKM, unit usaha BUMDes terdiri dari Desa *Mart*, Surabi Kayuambon, Penyalur Beras, Jasa Pembayaran dan beberapa unit usaha di bidang pertanian. Kondisi BUMDes saat awal pelaksanaan KKM dapat digambarkan bahwa BUMDes belum melakukan pencatatan atas aset, Kewajiban, dan Modal sejak awal pembentukan BUMDes. Akibatnya perkembangan BUMDes, apakah mengalami untung atau rugi belum dapat ditentukan secara jelas. Namun BUMDes memiliki bukti-bukti transaksi pembelian dan penerimaan modal yang disimpan oleh Ketua BUMDes. Unit usaha yang perlu diperhatikan ialah Desa *Mart* karena sejak awal pendirian, unit usaha ini telah melakukan transaksi dengan pencatatan manual., namun terus berhenti setelah membeli aplikasi IPOS, karena mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Padahal unit usaha Desa *Mart* merupakan unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan retail.

Solusi: Tim KKM melakukan pembenahan sistem pencatatan di setiap unit usaha agar lebih memudahkan petugas BUMDes dalam

melakukan pencatatan dan pelaporan. Atas persediaan toko pada BUMDes Desa *Mart* dilakukan inventarisasi fisik. Atas pencatatan pembelian-pembelian dan penjualan-penjualan secara manual dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pada aplikasi IPOS, serta atas investasi modal dari desa dicatat juga jurnal investasi, dan atas penggunaan aset desa dibuat jurnal pembayaran sewa secara bulanan. Dengan pencatatan-pencatatan tersebut maka BUMDes Desa *Mart* sudah mulai bisa melakukan manajemen usaha dengan normal, sebagaimana toko-toko *retailer* lain yang menjadi pesaing yang telah ada di sekitarnya seperti *Alfa Mart* dan *IndoMart*. Namun memang fokus selama KKM terutama kepada pencatatan persediaan. Untuk melaksanakan proses akuntansi secara lengkap, akan dilakukan melalui pendampingan berkala oleh penulis selaku Pembimbing KKM.

Terkait aplikasi persediaan yang digunakan, BUMDes Desa *Mart* sudah melakukan pembelian aplikasi IPOS. Aplikasi ini ketika kami kaji, cukup kompleks, namun sepertinya telah banyak digunakan toko-toko *retailer* yang sudah profesional. Kami sempat mencoba mencari aplikasi yang lebih sederhana. Namun ternyata sama-sama harus dibeli. Untuk mengembangkan sendiri berbasis Microsoft Access, kami melihat, tetap personil yang menggunakan harus mempelajari juga. Sehingga diputuskan, aplikasi menggunakan aplikasi yang telah dibeli. Dengan menyempatkan waktu untuk mempelajari selama 1-2 hari, akhirnya diperoleh pemahaman atas penggunaan aplikasi tersebut. Aplikasi IPOS cukup profesional, dengan menyertakan video pembelajaran dalam paket penjualannya.

Dikaitkan dengan model TAM ini, maka dapat diperkirakan bahwa permasalahan belum maksimalnya penggunaan aplikasi IPOS ini dapat disebabkan karena kombinasi lima hal, yaitu 1) belum diyakininya manfaat dari aplikasi IPOS oleh staf yang akan menjalankan, 2) adanya persepsi bahwa penggunaan aplikasi tidak mudah, 3) dorongan dari penanggung jawab BUMDes yang masih kurang, 4) fasilitas yang belum memadai (misal belum adanya *scanner* dan belum dilengkapinya persediaan yang ada dengan berkode), dan 5) ketiga variabel pemoderasi, sesuai UTAUT juga kurang mendukung.

2. Fokus Masalah: Manajemen BUMDes
Gambaran: Dilihat dari tanggal pendirian sampai pelaksanaan KKM, BUMDes Kayuambon terbilang maju. Namun jika melihat administrasi dan manajemen yang ada BUMDes Kayuambon terbilang masih harus melakukan perbaikan terus menerus karena bisa dikatakan bahwa BUMDes

Kayuambon ini bertumpu di satu orang saja yang disertai tanggung jawab Kepala Desa.

Solusi: Sebaiknya Desa Kayuambon menambah personil yang kompeten dan dapat bertanggung jawab untuk lebih memajukan BUMDes Kayuambon, baik itu dengan mendelegasikan kepada orang yang berbeda yang bertanggung jawab di setiap unit usaha maupun dengan mengangkat staf secara khusus untuk setiap unit usaha. Selain itu kepada Kepala Desa dan semua penanggung jawab BUMDes harus diberikan pemahaman tentang keterpisahan entitas BUMDes dengan Desa. Dalam kerangka ini, manajemen BUMDes harus mengenakan biaya sewa atas penggunaan aset desa untuk usaha BUMDes, sebaliknya penggunaan-penggunaan barang dagangan BUMDes atau persediaan-persediaan BUMDes yang lain, seperti untuk jamuan tamu atau untuk keperluan desa, harus diperlakukan seperti jual-beli biasa.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari keseluruhan program pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan serta *action research* ini adalah sebagai berikut:

1. Suatu aplikasi untuk memudahkan proses bisnis, meskipun telah dibuat dengan cermat atau meskipun telah dibuktikan di tempat lain dapat digunakan dengan baik, belum tentu pada usaha kecil dan menengah dapat langsung digunakan. Misal aplikasi IPOS yang telah dibeli oleh BUMDes Desa *Mart*, belum bisa dijalankan karena keterbatasan personil yang memberikan penjelasan tentang cara penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan teori akseptansi produk IT bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* berpengaruh terhadap akseptansi penggunaan produk IT, dan bahwa variabel seperti usia, jenis kelamin, pengalaman, menjadi variabel pemoderasi penggunaan IT tersebut.
2. BUMDes yang merupakan rintisan usaha di desa harus terus didukung keberadaannya oleh pemerintah, khususnya pemerintah kecamatan dan kabupaten tempat desa berlokasi. Salah satu wujud dukungan adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk dapat membantu memperbaiki menata usahakan BUMDes tersebut, selain tentu saja dengan pemerintah memberikan dukungan langsung.

Program pengabdian masyarakat di Desa Kayuambon yang berfokus pada BUMDes Kayuambon telah berjalan dengan baik khususnya pada unit usaha Desa *Mart* dan Surabi Kayuambon. Saran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maupun Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ke depannya :

1. Secara umum dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang menjadi konteks *paper* ini, masih perlu ditingkatkan koordinasi program antar kampus, mahasiswa, dan objek KKM sehingga peran serta objek KKM bisa lebih efektif dan program dapat berjalan lancar dan berdampak maksimal. Sejauh ini yang telah dilaksanakan, mahasiswa mencari sendiri objek desa yang akan mereka laksanakan KKM, menginventarisasi sendiri permasalahan yang ada, dan kemudian membuat laporan tertulis. Untuk kelompok yang beruntung mendapat dosen pembimbing, secara substansi pemahaman atas permasalahan yang ada oleh mahasiswa serta apakah KKM dapat memberikan kontribusi kepada desa, masih bisa dijaga kelayakannya. Namun untuk yang tidak terdapat dosen pembimbing, pelaksanaan KKM bisa hanya menjadi formalitas yang kurang berarti, baik bagi mahasiswa maupun bagi desa. Pendekatan dengan masyarakat harus dilakukan dengan sangat baik dengan cara yang diterima masyarakat sehingga masyarakat akan lebih menerima program yang dijalankan. Komunikasi dari kampus yang hanya disampaikan dalam bentuk surat kurang bisa menjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung. Selain itu waktu pelaksanaan yang hanya lima hari menjadi kendala tersendiri.

PUSTAKA

- Adhari, Agus, and Ismaidar I. 2017. "Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9 (1): 013. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728>.
- Davis, F. D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly* 319-340.
- Davis, F. D, R. P Bagozzi, and P. R. Warshaw. 1989. "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models." *Management Science* 982-1003.
- Ferrance, Eileen. 2000. *Action Research*. Providence: Northeast and Islands Regional Educational Laboratory At Brown University.
- Osborne, David, and Ted Gabler. 1992. *Reinventing Government*. New York: Addison Wesley Publ. Co.
- Sylvanus, Nwodo, Victor O Okolo, Gerald N Nebo, and Egodi Eze. 2017. "Managing Small and Medium Scale Enterprises in A Competitive Marketing Economy." *IOSR Journal of Business and Management* 21-31.
- Venkatesh, V, M. G. Morris, G. B. Davis, and F. D. Davis. 2003. "User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View." *MIS Quarterly* 425-478.